



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HADAWIYAH ENDAH UTAMI
2. Jabatan : KEPALA JURUSAN TARI
3. NHK : 681867

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.138.600.000**

1. Tanah Seluas 112 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 155.600.000
2. Tanah Seluas 183 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 733.000.000
3. Tanah Seluas 116 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. Tanah Seluas 116 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 204.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJAN SUPER Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOTOR, HONDA ASTREA Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	84.296.147
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.426.896.147
III. HUTANG	Rp.	76.002.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.350.894.147

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.